BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 144);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 143);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

19. Qanun . . .

19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024" adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(3) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 digunakan sebagai:
   a. bahan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024;
   b. bahan penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024;
   c. pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
   d. pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2024; dan
   e. bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

(2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini meliputi:
   1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024;
   2. Renja Dinas Syariat Islam Tahun 2024;
   3. Renja Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2024;
   4. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Tahun 2024;
   5. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024;
   6. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Tahun 2024;
   7. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024;
   8. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024;
   9. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2024;
   10. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024;
   11. Renja Dinas Sosial Tahun 2024;
   12. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024;
   13. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Tahun 2024;
   14. Renja Sekretariat Baitul Mal Tahun 2024;
   15. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024;
   16. Renja Dinas Pangan Tahun 2024;
   17. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024;
   18. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024;
   19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tahun 2024;
   20. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024;
   21. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2024;
   22. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024;

23. Renja . . .

23. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Tahun 2024;
24. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024;
25. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
26. Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2024;
27. Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024;
28. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024;
29. Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024;
30. Renja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024;
31. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024;
32. Renja Sekretariat DPRK Tahun 2024;
33. Renja Sekretariat Kecamatan Johan Pahlawan Tahun 2024;
34. Renja Sekretariat Kecamatan Kaway XVI Tahun 2024;
35. Renja Sekretariat Kecamatan Samatiga Tahun 2024;
36. Renja Sekretariat Kecamatan Woyla Tahun 2024;
37. Renja Sekretariat Kecamatan Sungai Mas Tahun 2024;
38. Renja Sekretariat Kecamatan Meureubo Tahun 2024;
39. Renja Sekretariat Kecamatan Pante Ceureumen Tahun 2024;
40. Renja Sekretariat Kecamatan Bubon Tahun 2024;
41. Renja Sekretariat Kecamatan Arongan Lambalek Tahun 2024;
42. Renja Sekretariat Kecamatan Woyla Timur Tahun 2024;
43. Renja Sekretariat Kecamatan Woyla Barat Tahun 2024;
44. Renja Sekretariat Kecamatan Panton Reu Tahun 2024;
45. Renja Inspektorat Tahun 2024;
46. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024;
47. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024;
48. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024;
49. Renja Dinas Pertanahan Tahun 2024;

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 17 Juli 2023 M
28 Zulhijjah 1444 H

PJ. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 17 Juli 2023 M
28 Zulhijjah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR: 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT TAHUN 2024

Nomor	Perangkat Daerah
01 /Renja/Disdikbud/2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
02 /Renja/DSI/2024	Dinas Syariat Islam
03 /Renja/DPD/2024	Dinas Pendidikan Dayah
04 /Renja/Set.MPD/2024	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
05 /Renja/Dinkes/2024	Dinas Kesehatan
06 /Renja/BLUD-RSUDCND/2024	Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh
07 /Renja/PUPR/2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
08 /Renja/Perkim/2024	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
09 /Renja/Satpol PPWH/2024	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
10 /Renja/Kesbang/2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11 /Renja/Dinsos/2024	Dinas Sosial
12 /Renja/BPBD/2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13 /Renja/Set.MPU/2024	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
14 /Renja/Set.BM/2024	Sekretariat Baitul Mal
15 /Renja/DP3AKB/2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
16 /Renja/Dispan/2024	Dinas Pangan
17 /Renja/DLH/2024	Dinas Lingkungan Hidup
18 /Renja/Disdukcapil/2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19 /Renja/DPMG/2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
20 /Renja/Dishub/2024	Dinas Perhubungan
21 /Renja/Diskominsa/2024	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
22 /Renja/DPMPTSP/2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23 /Renja/Set.MAA/2024	Sekretariat Majelis Adat Aceh
24 /Renja/Dispusip/2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25 /Renja/DKP/2024	Dinas Kelautan dan Perikanan
26 /Renja/Disparpora/2024	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
27 /Renja/DPTPH/2024	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Nomor	Perangkat Daerah
28 /Renja/Disbunnak/2024	Dinas Perkebunan dan Peternakan
29 /Renja/DPPKUKM/2024	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30 /Renja/DTTK/2024	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
31 /Renja/Setda/2024	Sekretariat Daerah
32 /Renja/Set.DPRK/2024	Sekretariat DPRK
33 /Renja/Johan Pahlawan/2024	Sekretariat Kecamatan Johan Pahlawan
34 /Renja/Kaway XVI/2024	Sekretariat Kecamatan Kaway XVI
35 /Renja/Samatiga/2024	Sekretariat Kecamatan Samatiga
36 /Renja/Woyla/2024	Sekretariat Kecamatan Woyla
37 /Renja/Sungai Mas/2024	Sekretariat Kecamatan Sungai Mas
38 /Renja/Meureubo/2024	Sekretariat Kecamatan Meureubo
39 /Renja/Pante Ceureumen/2024	Sekretariat Kecamatan Pante Ceureumen
40 /Renja/Bubon/2024	Sekretariat Kecamatan Bubon
41 /Renja/Arongan Lambalek/2024	Sekretariat Kecamatan Arongan Lambalek
42 /Renja/Woyla Timur/2024	Sekretariat Kecamatan Woyla Timur
43 /Renja/Woyla Barat/2024	Sekretariat Kecamatan Woyla Barat
44 /Renja/Panton Reu/2024	Sekretariat Kecamatan Panton Reu
45 /Renja/Inspektorat/2024	Inspektorat
46 /Renja/Bappeda/2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
47 /Renja/BPKD/2024	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
48 /Renja/BKPSDM/2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49 /Renja/Dispertan/2024	Dinas Pertanahan

PJ. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI